

Peran Kompetensi Aparatur Pemerintah dalam Penerapan e-Accounting untuk Meningkatkan Akuntabilitas dan Efisiensi Pelaporan Keuangan di Kecamatan Krembangan dan Kecamatan Asemrowo Surabaya.

Submission date: 10-Dec-2025 05:32PM (UTC+0700)

Submission ID: 2842227046 *by* Aliatus Nurrochmah

File name: 1222200089_Aliatus_Nurrochmah_Jurnal_Ilmiyah.pdf (459.93K)

Word count: 1966

Character count: 14385

Peran Kompetensi Aparatur Pemerintah dalam Penerapan e-Accounting untuk Meningkatkan Akuntabilitas dan Efisiensi Pelaporan Keuangan di Kecamatan Krembangan dan Kecamatan Asemrowo Surabaya.

Ali⁵us nurrochmah¹, Dewi Sutjahayani²

Aliatus06@gmail.com, dewisutjahyani@untag-sby.ac.id

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Abstract

The competence of government officials is a major factor in the successful implementation of e-Accounting in government agencies, particularly in the process of preparing financial reports based on Government Accounting Standards (SAP). This study aims to describe the role of official competence in the use of e-Accounting and how its implementation affects the accountability and efficiency of financial reporting in the Krembangan and Asemrowo districts of Surabaya. This study uses a qualitative approach through interviews, observations, and document reviews. The results show that the competence of officials still varies, especially in understanding accrual-based accounting, accuracy in data input, and the ability to operate system features. Although e-Accounting has improved accountability through documented and easily traceable transaction records, reporting efficiency has not been fully achieved due to differences in technical capabilities among employees and operational constraints of the system. Thus, skill improvement and continuous training are necessary so that the implementation of e-Accounting can support more effective, accurate, and compliant financial reporting.

Keywords: government apparatus competency, e-Accounting, SAP, accountability, reporting efficiency.

ABSTRAK

Kompetensi aparatur pemerintah menjadi faktor utama dalam keberhasilan penerapan e-Accounting pada instansi pemerintah, khususnya dalam proses penyusunan laporan keuangan berbasis Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Penelitian ini memiliki tujuan untuk menggambarkan peran kompetensi aparatur dalam penggunaan e-Accounting serta bagaimana penerapannya berpengaruh terhadap akuntabilitas dan efisiensi pelaporan keuangan pada Kecamatan Krembangan dan Kecamatan Asemrowo Surabaya. Pendekatan kualitatif diterapkan melalui teknik wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi aparatur masih bervariasi, terutama

dalam pemahaman akuntansi berbasis akrual, ketelitian dalam input data, dan kemampuan mengoperasikan fitur sistem. Walaupun e-Accounting telah meningkatkan akuntabilitas melalui pencatatan transaksi yang terdokumentasi dan mudah ditelusuri, efisiensi pelaporan belum tercapai sepenuhnya akibat perbedaan kemampuan teknis antarpegawai dan kendala operasional sistem. Dengan demikian, peningkatan keterampilan dan pelatihan berkelanjutan diperlukan agar penerapan e-Accounting dapat mendukung pelaporan keuangan yang lebih efektif, akurat, dan sesuai ketentuan.

Kata kunci: kompetensi aparatur pemerintah, e-Accounting, SAP, akuntabilitas, efisiensi pelaporan.

PENDAHULUAN

Kompetensi aparatur pemerintah merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Aparatur tidak hanya bertugas menjalankan administrasi, tetapi juga harus mampu mengolah data, memahami aturan pelaporan keuangan publik, serta menggunakan sistem berbasis teknologi informasi yang kini diterapkan dalam lembaga pemerintahan. Oleh karena itu, kemampuan aparatur sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan, khususnya dalam proses penyusunan laporan keuangan yang akurat, transparan dan sesuai ketentuan.

Pemerintah Indonesia terus mendorong digitalisasi pengelolaan keuangan melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu bentuk pelaksanaan dari kebijakan tersebut adalah penggunaan sistem e-Accounting yang mendukung penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Sistem ini bertujuan membantu proses pencatatan, pengolahan data, serta pelaporan keuangan agar lebih cepat, rapi, dan mudah ditelusuri.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan penggunaan sistem digital tidak hanya bergantung pada teknologi yang tersedia, tetapi juga kemampuan aparatur dalam mengoperasikannya. Beberapa peneliti seperti Gamayuni (2020), Putra dan Priono (2022), serta Rahayu dan Kanita (2023) menemukan bahwa kurangnya pengetahuan akuntansi dan keterampilan digital pada aparatur sering menimbulkan kesalahan pencatatan, keterlambatan laporan, dan kendala dalam proses pelaksanaan sistem. Artinya, kompetensi aparatur

memiliki peran besar dalam menentukan kualitas laporan keuangan dan efektivitas penerapan sistem e-Accounting.

Situasi ini juga ditemukan di Kecamatan Krembangan dan Kecamatan Asemrowo Surabaya. Hasil studi awal menunjukkan bahwa masih terdapat kendala seperti kesalahan pemilihan kode akun, keterbatasan pemahaman fitur aplikasi, serta ketidaktepatan waktu dalam penyusunan laporan. Kendala tersebut menunjukkan bahwa meskipun fasilitas sistem telah tersedia, kemampuan aparatur dalam mengelolanya belum merata dan masih perlu ditingkatkan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kompetensi aparatur pemerintah berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan e-Accounting, serta bagaimana dampaknya terhadap peningkatan akuntabilitas dan efisiensi pelaporan keuangan publik pada Kecamatan Krembangan dan Kecamatan Asemrowo Surabaya. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas sumber daya aparatur dan penyempurnaan sistem pelaporan keuangan berbasis digital di tingkat pemerintahan daerah.

³ METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan tersebut dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengeksplorasi fenomena secara mendalam bagaimana kompetensi aparatur pemerintah berperan dalam penerapan e-Accounting serta pengaruhnya terhadap akuntabilitas dan efisiensi pelaporan keuangan publik. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Krembangan dan Kecamatan Asemrowo Kota Surabaya yang telah menerapkan sistem e-Accounting dalam proses pelaporan⁸ keuangan. Waktu penelitian berlangsung mulai Januari hingga Maret 2025. Data yang didapatkan dalam penelitian data mencakup data primer dan data sekunder, dimana data primer¹⁶ dihipunkan melalui proses wawancara semi-terstruktur dengan aparatur pemerintah yang terlibat langsung dalam proses penyusunan laporan keuangan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumen pendukung yaitu laporan keuangan, struktur organisasi, pedoman penggunaan sistem, dan regulasi terkait. Pemilihan informasi dilakukan dengan metode purposive sampling, yakni penentuan informan berdasarkan kriteria tertentu, khususnya aparatur yang memiliki peran langsung dalam pengelolaan sistem e-Accounting seperti bendahara, staf keuangan, dan pejabat penanggung jawab keuangan.

Proses pengumpulan data dilaksanakan melalui metode wawancara, observasi, serta telaah dokumentasi. Wawancara diterapkan untuk memperoleh dan

menggali mengenai pemahaman, pengalaman, dan kendala aparatur dalam menggunakan e-Accounting. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung proses kerja aparatur saat mengoperasikan sistem. Studi dokumentasi dilakukan untuk memperkuat data melalui bukti terukir dan catatan resmi yang terkait dengan pelaporan keuangan. Data yang terkumpul kemudian ditranskripsikan, dikategorikan, dan direduksi sesuai fokus penelitian. Proses analisis data diterapkan dengan menggunakan pendekatan model analisis interaktif yang mencakup tahap reduksi data, penyajian data, serta proses penarikan kesimpulan. Dalam rangka menjadi validitas data, peneliti dilakukan teknik triangulasi sumber dan metode dengan membandingkan hasil wawancara, hasil observasi, serta dokumen pendukung agar informasi sehingga data yang dihasilkan bersifat valid dan memiliki tingkat kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

14

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini memberikan hasil bahwa kompetensi aparatur pemerintah merupakan faktor utama yang memengaruhi keberhasilan penerapan e-Accounting di Kecamatan Krembangan dan Kecamatan Asemrowo. Temuan lapangan memperlihatkan bahwa variasi pemahaman aparatur terhadap akuntansi pemerintahan, literasi digital, serta penggunaan aplikasi masih berbeda antarpegawai, sehingga berdampak pada akurasi dan ketepatan proses pelaporan keuangan.

1. Aspek Kompetensi Aparatur

Analisis data menunjukkan bahwa tingkat kompetensi aparatur memiliki pengaruh besar terhadap efektivitas penggunaan e-Accounting. Aparatur yang memiliki latar belakang akuntansi dan telah mengikuti pelatihan sistem mampu mengoperasikan fitur aplikasi dengan lebih tepat dan mandiri. Sebaliknya, aparatur dengan kemampuan teknis terbatas masih mengalami kesulitan dalam proses input data, penentuan kode akun, serta penyusunan jurnal penyesuaian. Kondisi ini menyebabkan ketergantungan pada rekan kerja yang lebih menguasai sistem dan membuat tahapan dalam penyusunan laporan keuangan berjalan kurang efisien. Temuan ini memperkuat bahwa keberhasilan digitalisasi pengelolaan keuangan daerah tidak hanya bergantung pada aspek teknologi, namun juga pada kesiapan sumber daya manusia sebagai pengguna utama sistem.

2. Aspek Laporan Keuangan berdasarkan PSAP 01

Penyusunan laporan keuangan pada kedua kecamatan telah mengikuti prinsip penyajian laporan sesuai PSAP 01 dalam PP Nomor 71 Tahun 2010. Format

laporan seperti ⁷ Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) telah tersusun melalui aplikasi. Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa kekeliruan dalam klasifikasi akun dan penyusunan jurnal akrual akibat keterbatasan pemahaman teknis sebagian aparatur. Karena itu, proses verifikasi dan koreksi masih diperlukan sebelum laporan keuangan diunggah sebagai dokumen resmi.

3. Aspek Implementasi Sistem e-Accounting

Pelaksanaan e-Accounting pada kedua kecamatan telah berjalan sesuai prosedur dan digunakan sebagai alat utama dalam pencatatan transaksi. Sistem ini membantu mempercepat proses administrasi keuangan, menyediakan jejak audit yang jelas, serta menyimpan data secara otomatis. Namun, pelaksanaan di lapangan menunjukkan bahwa efektivitas sistem masih bergantung pada kemampuan pengguna. Beberapa pegawai melaporkan kendala teknis dalam mengakses fitur tertentu, mengatasi kesalahan input, atau mengelola data yang terkunci, sehingga membutuhkan waktu tambahan untuk penyelesaian laporan.

4. Aspek Akuntabilitas dan Efisiensi Pelaporan Keuangan

Temuan penelitian mengindikasikan bahwa implementasi e-Accounting menimbulkan pengaruh nyata melalui peningkatan akuntabilitas pelaporan keuangan pada kedua kecamatan. Dengan sistem pencatatan digital, setiap transaksi yang diinput tersimpan secara otomatis dan memiliki jejak audit yang jelas. Kondisi ini membuat proses penelusuran data, klarifikasi informasi, maupun pembuktian transaksi menjadi lebih mudah dilakukan dibandingkan dengan metode manual. Selain itu, penggunaan e-Accounting membantu mengurangi potensi manipulasi dan kehilangan dokumen karena seluruh data tersimpan secara terstruktur di dalam sistem. Aparatur yang terlibat dalam pengelolaan keuangan juga menyatakan bahwa sistem memberikan rasa tanggung jawab lebih tinggi karena setiap aktivitas dapat terpantau dan tercatat sebagai bagian dari proses audit internal. Dengan demikian, keberadaan sistem berkontribusi pada peningkatan transparansi, keterbukaan informasi, serta akuntabilitas publik dalam pengelolaan keuangan daerah.

Namun, jika ditinjau dari aspek efisiensi, penerapan e-Accounting belum sepenuhnya berjalan optimal. Perbedaan kemampuan teknis antarpegawai menyebabkan durasi penyusunan laporan tidak seragam. Aparatur yang telah menguasai sistem dapat menyelesaikan pekerjaan dengan cepat, sedangkan aparatur yang belum mahir membutuhkan waktu tambahan untuk memahami fitur tertentu atau memperbaiki kesalahan input. Hal tersebut berdampak pada bertambahnya waktu validasi dan koreksi, terutama ketika terjadi ketidaksesuaian kode akun, kesalahan klasifikasi transaksi, atau duplikasi data. Selain faktor kompetensi, beberapa informan juga mengungkapkan bahwa kendala teknis seperti koneksi

jaringan, pembaruan aplikasi, dan akses fitur tertentu juga dapat menghambat kelancaran proses penyusunan laporan.

Secara umum, hasil tersebut menggambarkan bahwa e-Accounting memiliki potensi besar dalam meningkatkan akuntabilitas serta mutu pelaporan keuangan sektor pemerintahan daerah. Namun, peningkatan efisiensi masih memerlukan penyesuaian berkelanjutan baik dari aspek penguasaan teknologi, pendampingan teknis, maupun pemerataan kompetensi aparatur. Oleh karena itu, keberhasilan sistem digital tidak semata-mata bergantung pada perangkat yang diterapkan, melainkan turut ditentukan oleh kesiapan sumber daya manusia dalam menjalankan sistem secara tepat, teratur, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi aparatur pemerintah memiliki peran krusial dalam mendukung keberhasilan implementasi e-Accounting di Kecamatan Krembangan dan Kecamatan Asemrowo. Variasi kemampuan aparatur dalam memahami akuntansi berbasis akrual, mengoperasikan fitur aplikasi, dan menjaga ketelitian input data menjadi faktor penentu kualitas pelaporan keuangan berbasis digital. Walaupun penyusunan laporan keuangan telah mengikuti ketentuan PSAP 01 dan standar PP Nomor 71 Tahun 2010, masih ditemukan kekeliruan teknis dalam klasifikasi akun dan tahapan penyesuaian yang menunjukkan bahwa proses implementasi belum sepenuhnya merata. Penerapan e-Accounting memberikan dampak positif terhadap akuntabilitas pelaporan karena data transaksi tercatat secara digital dan lebih mudah ditelusuri, namun efisiensi pelaporan belum optimal akibat perbedaan kemampuan teknis antarpegawai dan hambatan operasional tertentu.

Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan upaya penguatan kompetensi aparatur melalui program pelatihan teknis yang secara berkesinambungan, serta pendampingan dalam penerapan sistem, serta evaluasi kompetensi secara berkala agar penggunaan e-Accounting dapat berjalan lebih efektif dan merata. Pemerintah daerah juga disarankan untuk menyediakan dukungan infrastruktur teknologi yang memadai serta pembaruan sistem secara rutin untuk meminimalkan kendala teknis selama proses pelaporan. Selain itu, diperlukan penguatan budaya kerja akuntabel melalui monitoring internal dan peningkatan kedisiplinan aparatur dalam melakukan input data sehingga proses pelaporan keuangan mampu diselesaikan lebih cepat, akurat, serta sesuai dengan standar yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Almadani, N., Pratama, F. A., & Nugrahani, E. (2024). *Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi dan Kompetensi SDM terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. *Jurnal Administrasi Publik*, 18(1), 45–56.
- Gamayuni, R. (2020). Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pengaruhnya terhadap Implementasi Akuntansi Pemerintahan. *Jurnal Akuntabilitas Publik*, 9(2), 112–123.
- Putra, M. S., & Priono, A. (2022). Pengaruh Sistem e-Government terhadap Efektivitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Sistem Informasi Pemerintahan*, 6(3), 201–210.
- Rahayu, S., & Kanita, R. (2023). Evaluasi Kesiapan ASN dalam Implementasi Sistem e-Accounting pada Pemerintah Daerah. *Jurnal Reformasi Administrasi Negara*, 5(1), 77–88.
- Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif: Pendekatan, Teknik, dan Analisis* (Edisi Revisi). Bandung: Alfabeta.
- Widyaningsih, T., & Firmansyah, A. (2021). Tantangan Digitalisasi Akuntansi Pemerintahan pada Era Transformasi Digital. *Jurnal Akuntansi dan Kebijakan Publik*, 7(4), 321–330.

Peran Kompetensi Aparatur Pemerintah dalam Penerapan e-Accounting untuk Meningkatkan Akuntabilitas dan Efisiensi Pelaporan Keuangan di Kecamatan Krembangan dan Kecamatan Asemrowo Surabaya.

ORIGINALITY REPORT

12%	11%	8%	6%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	yusranlapananda.wordpress.com Internet Source	1%
2	repository.ub.ac.id Internet Source	1%
3	Submitted to Universitas Sanata Dharma Student Paper	1%
4	Submitted to Universitas Slamet Riyadi Student Paper	1%
5	stieus.ejournal.web.id Internet Source	1%
6	Atie Rachmiate, Ike Junita Triwardhani, Alhamuddin, Cep Ubad Abdullah. "Islam, Media and Education in the Digital Era", Routledge, 2022 Publication	1%
7	peraturan.bpk.go.id Internet Source	1%
8	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	1%
9	kesbangpol.sumbarprov.go.id Internet Source	1%

10	docplayer.info Internet Source	1 %
11	doaj.org Internet Source	1 %
12	ejurnal.untag-smd.ac.id Internet Source	<1 %
13	journal-nusantara.com Internet Source	<1 %
14	core.ac.uk Internet Source	<1 %
15	eprints.poltekykpn.ac.id Internet Source	<1 %
16	journal2.um.ac.id Internet Source	<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches

< 2 words

Exclude bibliography On